

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina sejak tahun 2014 telah menjadi polemik internasional karena memiliki dampak yang signifikan dimana tidak hanya secara kawasan, namun juga berdampak terhadap kondisi dunia internasional. Hal tersebut kemudian memperoleh perhatian dan tuntutan perdamaian antar kedua negara oleh masyarakat internasional. Secara geografis, keduanya terletak pada posisi yang berdekatan dengan negara-negara anggota Uni Eropa dan Amerika Serikat.¹ Terlebih, untuk menjaga keamanan regional dan global, Uni Eropa dan Amerika Serikat berperan dalam mewujudkan perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Konflik bermula sejak tahun 2014 ketika disintegrasi internal di Ukraina terjadi diikuti dengan aksi Rusia melakukan tindakan aneksasi terhadap semenanjung Krimea dan referendum yang dikeluarkan oleh parlemen Krimea pada Maret 2014 yang menghasilkan hampir 97% masyarakat Krimea ingin melepaskan diri dari Ukraina dan berintegrasi dengan Rusia.² Hal tersebut kemudian mendapat penolakan keras dari Uni Eropa dan Amerika Serikat karena

¹ Randy Bion Bramastya dan Runitya Rompa Batan, "Pendekatan Diplomasi Ekonomi dalam Konflik Rusia-Ukraina," *Journal of Sosial Politik Integratif*, 2.3 (2022), 184–91.

² Faridha K Noorkusuma, "Analisa Kebijakan Intervensi Politik Rusia Di Wilayah Crimea Ukraina (Pada Masa Vladimir Putin Tahun 2012-2014)," *Universitas Muhammadiyah Malang*, 2017.

dinilai tidak valid dan bertentangan dengan konstitusi Ukraina.³ Selain itu, Rusia disebutkan telah menyebabkan stabilitas keamanan regional terganggu dan dinilai tidak menghormati independensi Ukraina. Oleh karena itu, Amerika Serikat, Uni Eropa, beserta negara-negara barat lainnya secara progresif melakukan pembatasan terhadap Rusia sejak Maret 2014 dan menjatuhkan sanksi terhadap Rusia atas invasi di Ukraina.⁴ Beberapa sanksi yang dikeluarkan berupa sanksi individual, pembatasan terhadap media, pembatasan diplomatik, pembatasan hubungan ekonomi, pembatasan visa, dan sanksi ekonomi.⁵ Sanksi ekonomi sendiri merupakan salah satu sanksi yang krusial dan menurut Rosyidin dan Fitrah tahun 2016 merupakan bentuk diplomasi koersif atau sebagai langkah alternatif dari perang.⁶ Salah satu tujuan dari kebijakan sanksi ekonomi adalah untuk mengubah kebijakan atau keputusan strategi suatu negara atau non-negara yang mengancam kepentingan nasional negara pengirim serta untuk mengecam suatu negara atau aktor non-negara yang melanggar norma internasional.⁷ Terdapat beberapa target dari sanksi ekonomi negara-negara Barat antara lain perdagangan, energi, transportasi, teknologi, pertahanan, dan finansial.⁸

³ Mega Chintia Gunadi, 'Upaya Ukraina Menghadapi Rusia Atas Aneksasi Semenanjung Crimea Tahun 2014', *Jurnal Online Mahasiswa*, 2.2 (2016), 1–23.

⁴ Nurhabibi, 'Strategi Rusia Menghadapi Sanksi Ekonomi Dari Amerika Serikat Dan Uni Eropa (2014-2017)', *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, 2019.

⁵ European Council, 'EU Restrictive Measures against Russia over Ukraine (since 2014)' diakses dalam <https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/restrictive-measures-against-russia-over-ukraine/> (28/3/2023).

⁶ Achmad Ismail, "Sanksi Ekonomi dalam Tinjauan Politik dan Diplomasi Internasional: Resensi Buku," *Indonesian Perspective*, 5.1 (2020) <<https://doi.org/10.14710/ip.v5i1.30197>>.

⁷ Jonathan Masters, 'What Are Economic Sanctions?', *Council on Foreign Relations*, 2019 diakses dalam <https://www.cfr.org/backgrounder/what-are-economic-sanctions> (23/3/2023).

⁸ European Council, *Op. Cit.*

Sanksi finansial sendiri merupakan salah satu sanksi ekonomi yang memiliki dampak signifikan karena mencakup alur keuangan dalam jaringan bank-bank dan institusi keuangan. Selain itu, sanksi tersebut juga berdampak tidak hanya bagi negara, namun kelompok bisnis dan individu sekalipun. Pada dasarnya, sanksi finansial lebih sering digunakan daripada sanksi lainnya dengan tujuan mempromosikan demokrasi dan Hak Asasi Manusia.⁹ Berbeda dengan sanksi ekonomi lainnya, sanksi finansial tidak memerlukan hubungan ekonomi secara langsung dengan negara yang menjadi target sanksi. Hal tersebut dikarenakan kekuasaan dominasi barat yang telah terstruktur dalam sistem finansial global. Beberapa negara yang telah menjadi target sanksi finansial antara lain Iran, Korea Utara, Suriah, dan Rusia yang telah dijatuhi sanksi finansial oleh Amerika Serikat sebagai respon aktivitas nuklir.¹⁰ Secara signifikan, Amerika Serikat telah menggunakan sanksi finansial sebagai obyek kebijakan luar negerinya dengan mengisolasi bank-bank sentral dan bank koresponden atau institusi keuangan lainnya terhadap sistem keuangan global.¹¹

Sanksi Finansial merupakan instrumen yang dapat dengan mudah dijatuhkan kepada suatu negara tertentu karena berada di bawah dominasi negara-negara barat. Salah satunya adalah layanan pesan keuangan global terbesar atau *the Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication* (SWIFT) yang

⁹ Marco Cipriani, Linda S. Goldberg, dan Gabriele La Spada, *Financial Sanctions, SWIFT, and the Architecture of the International Payments System*, Federal Reserve Bank of New York Staff Reports, 2023.

¹⁰ Aaron Arnold, "The True Costs of Financial Sanctions," *Survival*, 58.3 (2016), 77–100 <<https://doi.org/10.1080/00396338.2016.1186981>>.

¹¹ Liana Wong dan Rebecca M. Nelson, *International Financial Messaging Systems*, Congressional Research Service, 2021 <<https://sgp.fas.org/crs/row/R46843.pdf>>.

berkedudukan di Belgia sehingga berada dibawah payung peraturan Uni Eropa dan dominasi Amerika Serikat.¹² SWIFT merupakan penyedia layanan perpesanan keuangan global yang aman menggantikan telex dan telah menghubungkan lebih dari 11.000 bank, institusi keuangan, dan perusahaan di sekitar 200 lebih negara dan wilayah.¹³

Sebelumnya pada tahun 2014, Rusia telah mendapat ancaman tindakan pembatasan akses terhadap SWIFT.¹⁴ Tindakan tersebut dilakukan ketika aneksasi terhadap semenanjung Krimea dimana beberapa bank dan institusi keuangan Rusia telah dijatuhi sanksi termasuk bank sentral Rusia. Hal tersebut menyebabkan ketidakmampuan Rusia untuk mengakses secara bebas sebagian cadangan devisa yang disimpan dalam Euro dan dolar AS.¹⁵ Uni Eropa dan Amerika Serikat sendiri telah mengajukan pemutusan Rusia dari SWIFT.¹⁶ Namun, pada Maret 2015, terdapat sebuah paradoks dimana Rusia memperoleh kursi di dewan SWIFT sehingga terjadi peningkatan transaksi bank-bank Rusia.¹⁷ Pada tahun 2021-2022, ketegangan antara Rusia dan Ukraina kembali mengalami eskalasi dengan penempatan militer Rusia di perbatasan Ukraina. Hal tersebut menyebabkan

¹² Arnold, *Op. Cit.*

¹³ SWIFT, 'Swift and Sanctions' diakses dalam <https://www.swift.com/about-us/legal/compliance-0/swift-and-sanctions#what-is-swift?> (29/3/2023).

¹⁴ SWIFT, 'Swift Sanctions Statement', 2014, diakses dalam <https://www.swift.com/insights/press-releases/swift-sanctions-statement-0> (29/3/2023).

¹⁵ P. S. Srinivas, "Can China's CIPS help Russia after its ban from SWIFT?," *EAI Commentary*, 47, 2022, 1–4 <<https://research.nus.edu.sg/eai/wp-content/uploads/sites/2/2022/03/Eaic-47-20220304.pdf>>.

¹⁶ Andreas Nölke, "GEOECONOMIC INFRASTRUCTURES: Building Chinese-Russian alternatives to SWIFT," in *Capital Claims: Power and Global Finance*, ed. oleh Benjamin Braun dan Kai Koddenbrock (New York: Routledge, 2022), hal. 158–77 <<https://doi.org/10.4324/9781003218487>>.

¹⁷ Viljar Veebel dan Raul Markus, "At the Dawn of a New Era of Sanctions: Russian-Ukrainian Crisis and Sanctions," *Orbis*, 60.1 (2016), 128–39 <<https://doi.org/10.1016/j.orbis.2015.12.001>>.

beberapa bank Rusia dan Belarus dikeluarkan dari jaringan finansial global yaitu SWIFT pada Maret 2022.¹⁸

Rusia dalam hal ini setelah mendapatkan sanksi mengklaim bahwa sanksi merupakan pedang bermata dua dimana negara yang menerapkan sanksi akan membahayakan bisnis mereka sendiri. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wakil ketua Dewan Keamanan Federal Rusia, Dmitry Medvedev dimana keputusan akses Rusia dalam SWIFT berdampak pada perekonomian Rusia dan pembentukan mekanisme keamanan perekonomiannya.¹⁹ Salah satunya yaitu terbentuknya *Financial Messaging System of the Bank of Russia* (SPFS) pada tahun 2014 berdasarkan standar ISO 20022 dan pesan format bebas tanpa perantara serta membayar biaya tetap sebesar RUB 0,8-1,0 (kurang dari \$0,02 USD) per pesan. Terhitung sejak April 2022, terdapat lebih dari 400 bank dan lebih dari 10 negara termasuk Iran, Turki, Kuba, Tiongkok, dan lainnya terkoneksi dengan SPFS.²⁰ Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas mengenai pengaruh keputusan Rusia dari *the Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication* (SWIFT) terhadap kemandirian ekonomi Rusia.

Rusia sendiri sejak tahun 2014, ketika sanksi Amerika Serikat dan Uni Eropa dijatuhkan berturut-turut, telah mengambil tindakan sanksi ekonomi balasan untuk pembangunan ekonomi dalam negeri dan mencukupi kebutuhan dalam

¹⁸ SWIFT, 'An Update to Our Message for the Swift Community', 2022, diakses dalam <https://www.swift.com/news-events/news/message-swift-community> (24/3/2023).

¹⁹ Government of the Russian Federation, "Dmitry Medvedev's interview with China Central Television," 2016
<<http://government.ru/en/news/25191/#25191=33:84:Vjj,33:96:kx3;34:15:yxJ,34:34:p5r>> [diakses 14 Juni 2023].

²⁰ Cipriani, Goldberg, dan La Spada.

negeri.²¹ Sanksi ekonomi balasan yang diberikan Rusia terhadap negara-negara barat merupakan bentuk *Self-help strategy* Rusia dengan menjatuhkan embargo impor bahan makanan dari negara-negara barat.²² Rusia juga menerapkan strategi substitusi impor yaitu strategi menukar barang impor dengan barang hasil domestik atau produk lokal untuk mempertahankan stabilitas ekonomi dan politik serta kepentingan nasionalnya.²³ Selain itu, dengan meningkatkan produksi agrikultur dari tahun 2014, peningkatan dan eksplorasi migas, serta membangun hubungan diplomasi dengan China dalam bidang energi, pertahanan, dan militer.²⁴

1.2 Rumusan Masalah

Dari beberapa uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang di atas maka penelitian ini mengambil rumusan masalah penelitian yaitu **Bagaimana Pengaruh Pemutusan Rusia dari *the Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications* (SWIFT) Terhadap Kemandirian Ekonomi Rusia?**

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pengaruh pemutusan Rusia dari *the Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications* (SWIFT) terhadap

²¹ Igo Ilham Mahendra, Sayyidul Mubin, dan Adib Izzudin, “KEBIJAKAN RUSIA UNTUK BERTAHAN MENGHADAPI SANKSI EKONOMI UNI EROPA DI TAHUN 2016-2020 MELALUI STRATEGI IMPORT SUBSTITUTION,” *Jurnal Pena Wimaya*, 2.1 (2021), 86–106 <<https://doi.org/https://doi.org/10.31315/jpw.v2i1.6457.g4166>>.

²² Ary Rian Anggara, “Strategi Rusia Menghadapi Sanksi Ekonomi Amerika Serikat Dan Uni Eropa (2014-2015),” *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 6.3 (2018), 995–1010.

²³ Mahendra, Mubin, and Izzudin, *Op. Cit.*

²⁴ Anggara, *Op. Cit.*

kemandirian ekonomi Rusia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menambah wawasan dalam keterkaitan antara politik dan ekonomi terutama di sektor finansial sistem pembayaran internasional, sistem pembayaran nasional, dan peran negara dalam menyesuaikan perekonomiannya.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1.3.2.1 Manfaat Akademis

Penelitian tentang pengaruh keputusan Rusia dari *the Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications* (SWIFT) terhadap kemandirian ekonomi Rusia diharapkan berkontribusi untuk memberikan pengertian baru dan pemahaman yang komprehensif dalam pembahasan tentang keterkaitan antara politik dan ekonomi sehingga dapat menjadi inspirasi di penelitian baru terutama dalam kajian Hubungan Internasional. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber referensi atau tambahan baru untuk perkembangan keilmuan penelitian ekonomi politik internasional terutama di sektor finansial dan sistem pembayaran internasional. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi sumber referensi terkait eskalasi konflik Rusia dan Ukraina beserta negara-negara barat lainnya melalui sudut pandang ekonomi.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi sumbangsih ilmu pengetahuan dan menambah wawasan dan pemahaman peneliti mengenai dinamika ekonomi politik internasional dan dinamika sanksi ekonomi terutama di sektor finansial yang terjadi saat konflik Rusia dan Ukraina. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan

menjadi wawasan baru peneliti dalam mengetahui pendekatan-pendekatan baru dalam sanksi ekonomi non-tradisional melalui SWIFT.

1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menggunakan beberapa penelitian yang sudah ada sebelumnya untuk ditinjau sebagai penunjang originalitas penelitian baru. Kemudian, terdapat dua kategorisasi dalam meninjau penelitian sebelumnya yaitu Sanksi Finansial Melalui SWIFT dan strategi Rusia dalam menghadapi sanksi finansial.

1.4.1 Sanksi Finansial Melalui SWIFT

Penelitian yang pertama adalah jurnal yang ditulis oleh Aaron Arnold berjudul *The True Costs of Financial Sanctions* menggunakan teori sanksi ekonomi sebagai kerangka pemikiran.²⁵ Penelitian ini membahas mengenai sanksi finansial yaitu *non-traditional economic sanctions* yang menargetkan pada bank-bank dengan tujuan untuk menegakkan norma dan standar global atau biasa disebut dengan pendekatan tidak langsung. Sanksi finansial disebutkan bahwa memiliki pengaruh yang signifikan akibat sistem keuangan global yang telah terstruktur didominasi oleh Barat.

Iran merupakan negara yang telah menerima sanksi ekonomi yang digagas oleh Amerika Serikat dengan mengisolasi Iran dari sistem perbankan global untuk mengekang ambisi rudal nuklir dan balistik Iran. Diikuti pada tahun 2012, dewan Uni Eropa juga menerapkan sanksi finansial terhadap Bank Sentral Iran termasuk

²⁵ Arnold, *Op. Cit.*

pelayanan pesan keuangan (*financial-messaging services*). Hal tersebut berdampak signifikan karena *financial-messaging services* terbesar di dunia adalah *the Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication* (SWIFT) yang bertempat di Belgia, negara anggota Uni Eropa. Selain itu, sanksi tersebut juga berdampak pada terganggunya aktivitas perdagangan internasional Iran sehingga menjadi prioritas utama untuk lepas dari sanksi tersebut. Namun, sanksi finansial sendiri menyebabkan suatu negara yang menjadi target sanksi dapat meminimalisir dominasi Amerika Serikat dan menciptakan resistensi terhadap perekonomian mereka. Sanksi finansial yang berlebihan juga menyebabkan adanya pembayaran atau transaksi bisnis diluar dolar Amerika dan mengecualikan Amerika sebagai pasar mereka.

Penelitian kedua merupakan jurnal yang ditulis oleh **Henry Farrell dan Abraham L. Newman** berjudul *Weaponized Interdependence: How Global Economic Networks Shape State Coercion* dalam jurnal *International Security* 44 (1).²⁶ Penelitian ini membahas mengenai kebebasan dalam internet menjadi retorika Amerika Serikat membentuk hubungan dengan jaringan komunikasi online. Dengan dominasinya menciptakan kekuatan jaringan yang menguntungkan termasuk terhadap negara-negara sekutunya. Salah satunya yaitu pasca serangan 9/11 melalui SWIFT, pusat dari sistem pembayaran internasional dimana menyediakan data hampir keseluruhan transaksi finansial global.

²⁶ Henry Farrell dan Abraham L. Newman, "Weaponized Interdependence: How Global Economic Networks Shape State Coercion," *International Security*, 44.1 (2019), 42–79 <https://doi.org/10.1162/isec_a_00351>.

Penelitian ini menghasilkan bahwa globalisasi ekonomi menciptakan rangkaian struktur internasional melalui jaringan global sehingga membentuk adanya bentuk kekuasaan baru bagi negara-negara. Globalisasi juga membentuk jaringan global, SWIFT, sebagai bentuk senjata baru. Data-data dalam SWIFT dipergunakan untuk tujuan keamanan dan secara sistematis menggunakan SWIFT sebagai sanksi dengan mengecualikan suatu negara dalam sistem keuangan dunia.

Penelitian ketiga merupakan bagian buku yang ditulis oleh **Mariam Majd** dengan judul *The Cost of a SWIFT Kick: Estimating the Cost of Financial Sanction on Iran* dalam buku *The Political Economy of International Finance in an Age of Inequality*.²⁷ Penelitian Majd menjelaskan bahwa pada tahun 2000-an, Amerika Serikat mulai menggunakan sanksi finansial yang menargetkan elit pemerintah dan melindungi masyarakat sipil yang menjadi korban dari sanksi perdagangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian ekonomika kuantitatif dengan pendekatan makroekonomi struktural.

Penelitian ini menghasilkan bahwa konsep penyempitan target atau sanksi finansial “*smart*” sebagai respon krisis kemanusiaan di Iran yang berfokus pada arus keuangan dibanding dengan ranah perdagangan. Pada tahun 2012, terdapat paket sanksi finansial unik yang dijatuhkan terhadap Republik Islam Iran. Iran dipaksa untuk mematuhi sanksi terhadap bank sentral dan berdasarkan EU *Regulation 267/2012*, Iran menjadi negara pertama yang dikeluarkan dari *the Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications* (SWIFT).

²⁷ Mariam Majd, “The cost of a SWIFT kick: Estimating the cost of financial sanctions on Iran,” in *The Political Economy of International Finance in an Age of Inequality*, ed. oleh Gerald A. Epstein (Edward Elgar, 2018), hal. 175–93 <<https://doi.org/10.4337/9781788972635>>.

Beberapa catatan jurnal dan analisis akademik melaporkan bahwa warga Iran menderita karena paket sanksi tersebut dan kurang terbuka terhadap ekonomi riil Iran. Hal tersebut dapat ditunjukkan pada kelangkaan obat, bahan makanan, dan alat kesehatan serta meningkatnya angka kemiskinan akibat inflasi tinggi dan pengangguran. Beberapa kelangkaan obat di Iran diidentifikasi sebagai dampak dari sanksi SWIFT dan klasifikasi WHO.

Penelitian keempat merupakan bagian buku yang ditulis oleh **Sajjad Faraji Dizaji** dengan judul *The Impact of Sanction on the Banking System: New Evidence from Iran* dalam buku *Research Handbook on Economic Sanctions*.²⁸

Penelitian ini menjelaskan bahwa sejak revolusi 1979, Pemerintah Iran telah menghadapi berbagai sanksi ekonomi dan finansial oleh Amerika Serikat. Pada awal tahun 2000, Amerika Serikat menjatuhkan sanksi karena Iran dianggap telah mendukung aksi terorisme dan mengembangkan senjata penghancur massal dan pada tahun 2003, *the International Atomic Energy (IAE)* mengonfirmasi keberadaan situs nuklir di Iran dan adanya reaktivasi program nuklir pada tahun 2005. Hal tersebut kemudian menyebabkan PBB, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan beberapa upaya multilateral lainnya menjatuhkan sanksi terhadap Iran. Dalam jangka tahun 2006 dan 2012, Iran telah memperoleh pembatasan pada teknologi transfer, transaksi finansial, investasi, repatriasi pendapatan pada berbagai entitas negara termasuk pihak swasta di Iran. Kemudian, AS dan UE menyepakati sanksi minyak terhadap Iran dan menutup aksesnya ke fasilitas SWIFT. Oleh karena itu,

²⁸ Sajjad Faraji Dizaji, "The Impact of Sanctions on the Banking System: New Evidence from Iran," in *Research Handbook on Economic Sanctions*, ed. oleh Peter A.G. van Bergeijk (Edward Elgar Publishing, 2021), hal. 330–50 <<https://doi.org/10.4337/9781839102721>>.

Iran tidak dapat mengekspor produk hidrokarbon dan tidak dapat memulangkan pendapatan eksportnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan metode ekonometrika *frontier* dan menggunakan pendekatan intermediasi dimana menganggap lembaga keuangan sebagai mediator antara *supply* dan *demand* keuangan.

Penelitian ini menghasilkan bahwa nilai pinjaman dan investasi beserta harga tenaga kerja menyebabkan dampak signifikan secara positif terhadap biaya bank Iran selama berada di bawah sanksi. Berdasarkan *Fourier-Flexible* mengungkapkan bahwa efisiensi biaya bank Iran mengalami tren penurunan setelah pengetatan sanksi pada tahun 2006. Selain itu, swasta dan bank komersial menunjukkan bahwa kinerja keduanya lebih baik daripada bank milik pemerintah selama periode sanksi dalam hal total biaya. Meskipun perjanjian nuklir antara Iran dan the P5+1 (Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Rusia, Tiongkok, dan Jerman) mengurangi biaya bank, namun mundurnya AS dari JCPOA, perjanjian tersebut gagal dalam mengurangi inefisiensi bank-bank Iran.

1.4.2 Dampak dan Upaya Rusia dalam Menghadapi Sanksi Finansial

Penelitian kelima merupakan jurnal yang ditulis oleh **Murillo de Oliveira Dias, Leonardo Jose Dias Pereira, dan Patricia dos Santos Vieira** dengan judul ***Are the Russian Banks Threatened with Removal from SWIFT? A Multiple Case Study on Interbank Financial Messaging System*** dalam *International Journal of Scientific Research and Management (IJSRM)*.²⁹ Penelitian ini membahas

²⁹ Dr. Murillo De Oliveira Dias, Leonardo José Dias Pereira, dan Patrícia Dos Santos Vieira, “Are the Russian Banks Threatened with Removal from SWIFT? A Multiple Case Study on Interbank Financial Messaging Systems,” *International Journal of Scientific Research and Management*, 10.03 (2022), 3137–44 <<https://doi.org/10.18535/ijstrm/v10i3.em1>>.

mengenai dikeluarkannya bank-bank Rusia dari SWIFT yang berdampak pada kurang lebih 300 bank Rusia sebagai dampak invasi Rusia terhadap Ukraina. Namun, dikeluarkannya Rusia dari SWIFT tidak terlalu berdampak pada perekonomian Rusia karena adanya alternatif dari SWIFT. Penelitian ini menggunakan pendekatan *multiple-methods* yang menggabungkan penelitian arsip dan studi kasus dengan unit analisis SWIFT, SPFS, CIPS, dan SFMS.

Terdapat beberapa implikasi akibat Rusia dikeluarkan dari SWIFT antara lain SWIFT kehilangan pemasukan, bank-bank Rusia tidak dapat melakukan dan menerima transaksi untuk perdagangan, gangguan laba dalam produksi minyak dan gas Rusia dan resesi lebih lanjut di Rusia, beberapa bank Rusia yang terkena sanksi menggunakan alternatif dari Tiongkok dan India termasuk SPFS milik Rusia, mempersulit bank-bank Rusia beroperasi secara global, Uni Eropa akan terdampak dalam jangka panjang mengenai impor minyak dan gas, terhambatnya pembayaran utang termasuk impor dan ekspor, dan terjadinya eskalasi konflik di wilayah Eropa. Meskipun Rusia telah membuat versi SWIFT nasionalnya sendiri, jumlah bank dan lembaga keuangan yang terdaftar masih terlalu rendah dan volume operasi transfer kecil.

Penelitian keenam merupakan *working paper* yang ditulis oleh **Farid Makhoulf dan Refk Selmi** berjudul *Do sanctions work in a crypto world? The impact of the removal of Russian Banks from SWIFT on Remittances*.³⁰

Penelitian ini membahas mengenai pemutusan total server Rusia dari sistem

³⁰ Farid Makhoulf dan Refk Selmi, *Do sanctions work in a crypto world? The impact of the removal of Russian Banks from SWIFT on Remittances* To cite this version : HAL Id : hal-03599089, HAL Open Science, 2022 <<https://hal.science/hal-03599089v1/document>>.

keuangan global yaitu pemutusan dari sistem pembayaran SWIFT. Sanksi ekonomi berdampak buruk pada perekonomian Rusia. Hal tersebut menyebabkan Moskow tertutup dari dunia keuangan dan masyarakat Rusia semakin aktif di pasar mata uang kripto, namun masih terdapat kesulitan bagi masyarakat Rusia menggunakan kripto (*cryptocurrency*) dengan sifat *blockchain* yang dapat dilacak dan kurangnya likuiditas.

Penelitian ini menghasilkan bahwa dampak sanksi dalam pengiriman uang dapat dikategorikan dalam dua tipe yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Secara jangka pendek secara langsung berdampak pada terhambatnya aktivitas bank dalam transaksi internasional. Selain itu, terdapat pendapat dari ahli dan analis keuangan bahwa entitas Rusia membuat kesepakatan dengan *cryptocurrency*. Namun, terdapat keterbatasan volume dan likuiditas dalam *cryptocurrency* yang tidak dapat mengikuti kebutuhan ekonomi Rusia. Terlebih dengan *blockchain* memungkinkan pergerakan kuangan dari satu akun ke akun lainnya mudah terdeteksi dan termasuk kedalam aset yang sangat berisiko. Secara jangka panjang, sanksi tersebut dapat berdampak pada imigran dan pengiriman uang. Selain itu, perkembangan sanksi tersebut dapat berimplikasi terhadap perekonomian dunia terutama dengan potensi inflasi.

Penelitian ketujuh merupakan jurnal yang ditulis oleh **Tanvir Hasib dan Vijayakumar Vengadasalam** yang berjudul *Impact of SWIFT Sanction on Global Economy*.³¹ Penelitian ini menjelaskan bahwa perang Rusia dan Ukraina

³¹ Tanvir Hasib dan V Vijayakumar Vengadasalam, "Impact of SWIFT Sanction on Global Economy," *Proceedings of the International Conference on Technology and Innovation Management (ICTIM 2022)*, 2022, 255–63 <https://doi.org/10.2991/978-94-6463-080-0_22>.

yang sedang berlangsung telah membawa sistem pembayaran SWIFT naik ke permukaan dengan AS dan negara-negara Eropa yang turut mengambil tindakan untuk menghapus Rusia dari sistem. Hal ini dapat berdampak signifikan bagi bank-bank Rusia terutama bank kecil. Larangan akses Rusia ke SWIFT kemudian berdampak pada terganggunya ekonomi global termasuk perekonomian Rusia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan ekonomi global dan sanksi SWIFT.

Penelitian ini menghasilkan bahwa SWIFT telah berpeluang dan siap untuk menghadapi digitalisasi serta memungkinkan penggunaannya untuk membuka peluang di segmen pasar baru. Dengan pembiayaan dengan nilai rendah dan mengurangi biaya transaksi menciptakan peluang SWIFT di sektor UKM dan konsumen. Larangan akses Rusia terhadap SWIFT memungkinkan percepatan sistem tersebut untuk memasuki era baru dalam aliran keuangan global. Selain itu, kemampuan SWIFT dalam menjatuhkan sanksi keuangan dengan konsekuensi yang serius akan menjadi terbatas. Adanya alternatif yang diciptakan oleh Rusia dan Tiongkok dalam mengembangkan sistem yang saling terhubung menyebabkan era dimana kemungkinan sistem pesan yang aman dan universal tidak lagi dapat diwujudkan.

Penelitian ini berbeda dengan beberapa penelitian terdahulu dengan menggunakan teori neo-merkantilisme, konsep nasionalisme ekonomi, dan konsep sanksi ekonomi sebagai dasar dalam menjelaskan fenomena serta strategi Rusia dalam menciptakan kemandirian ekonominya ketika menghadapi sanksi finansial untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian.

Tabel 1.1 Tabel Penelitian Terdahulu

No	Judul dan Penulis	Jenis Penelitian dan Landasan Konseptual	Hasil Penelitian
1.	<p>Aaron Arnold</p> <p><i>“The True Costs of Financial Sanctions”</i></p>	<p>Jenis Penelitian: <i>kualitatif</i></p> <p>Pendekatan: <i>Sanksi Ekonomi</i></p>	<p>Sanksi finansial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian suatu negara tertentu akibat sistem keuangan global yang telah terstruktur didominasi oleh Barat. Namun, sanksi finansial sendiri menyebabkan suatu negara yang menjadi target sanksi dapat meminimalisir dominasi Amerika Serikat dan menciptakan resistensi terhadap perekonomian mereka. Sanksi finansial yang berlebihan juga menyebabkan adanya pembayaran atau transaksi bisnis diluar dolar Amerika dan mengecualikan Amerika sebagai pasar mereka.</p>

2.	<p>Henry Farrell dan Abraham L. Newman</p> <p>“Weaponized Interdependence: How Global Economic Networks Shape State Coercion”</p>	<p>Jenis Penelitian: <i>Kualitatif</i></p> <p>Pendekatan: <i>Liberalisme Interdependensi</i></p>	<p>Penelitian ini menghasilkan bahwa globalisasi ekonomi menciptakan rangkaian struktur internasional melalui jaringan global sehingga membentuk adanya bentuk kekuasaan baru bagi negara-negara.</p> <p>Globalisasi juga membentuk jaringan global, SWIFT, sebagai bentuk senjata baru.</p>
3.	<p>Mariam Majd</p> <p>“The Cost of a SWIFT Kick: Estimating the Cost of Financial Sanction on Iran”</p>	<p>Jenis Penelitian: <i>Kuantitatif</i> - <i>Ekonometrika</i></p> <p>Pendekatan: <i>Marcoeonomi Structural</i></p>	<p>Konsep penyempitan target atau sanksi finansial “<i>smart</i>” sebagai respon krisis kemanusiaan di Iran yang berfokus pada arus keuangan dibanding dengan ranah perdagangan. Pada tahun 2012, terdapat paket sanksi finansial unik yang dijatuhkan terhadap Republik Islam Iran. Iran dipaksa untuk mematuhi sanksi terhadap bank sentral dan berdasarkan EU</p>

			<p><i>Regulation 267/2012</i>, Iran menjadi negara pertama yang dikeluarkan dari <i>the Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications</i> (SWIFT). Kemudian, total biaya sanksi terhadap PDB Iran pada tahun 2012-2015 diperkirakan sekitar 60,4 miliar USD per tahun.</p>
4.	<p>Sajjad Faraji Dizaji “The Impact of Sanction on the Banking System: New Evidence from Iran”</p>	<p>Jenis Penelitian: <i>Kuantitatif</i> - <i>Ekonometrika</i> Pendekatan: <i>Intermediasi</i></p>	<p>Nilai pinjaman dan investasi beserta harga tenaga kerja menyebabkan dampak signifikan secara positif terhadap biaya bank Iran selama berada di bawah sanksi. Berdasarkan <i>Fourier-Flexible</i> mengungkapkan bahwa efisiensi biaya bank Iran mengalami tren penurunan setelah pengetatan sanksi pada tahun 2006. Selain itu, swasta dan bank komersial menunjukkan bahwa kinerja keduanya</p>

			<p>lebih baik daripada bank milik pemerintah selama periode sanksi dalam hal total biaya. Meskipun perjanjian nuklir antara Iran dan <i>the</i> P5+1 mengurangi biaya bank, namun mundurnya AS dari JCPOA, perjanjian tersebut gagal dalam mengurangi inefisiensi bank-bank Iran</p>
5.	<p>Murillo de Oliveira Dias, Leonardo Jose Dias Pereira, dan Patricia dos Santos Vieira</p> <p>“Are the Russian Banks Threatened with Removal from SWIFT? A Multiple Case Study on Interbank Financial Messaging System”</p>	<p>Jenis Penelitian: <i>Kualitatif</i> Pendekatan: <i>International Finance</i></p>	<p>Terdapat beberapa implikasi akibat Rusia dikeluarkan dari SWIFT antara lain SWIFT kehilangan pemasukan, bank-bank Rusia tidak dapat melakukan dan menerima transaksi untuk perdagangan, gangguan laba dalam produksi minyak dan gas Rusia dan resesi lebih lanjut di Rusia, beberapa bank Rusia yang terkena sanksi menggunakan alternatif dari Tiongkok dan India termasuk SPFS milik Rusia, mempersulit bank-bank</p>

			Rusia beroperasi secara global, Uni Eropa akan terdampak dalam jangka panjang mengenai impor minyak dan gas, terhambatnya pembayaran utang termasuk impor dan ekspor, dan terjadinya eskalasi konflik di wilayah Eropa.
6.	<p>Farid Makhoulf dan Refk Selmi</p> <p>“Do sanctions work in a crypto world? The impact of the removal of Russian Banks from SWIFT on Remittances”</p>	<p>Jenis Penelitian: <i>Kualitatif</i></p> <p>Pendekatan: <i>Konsep Cryptocurrency</i></p>	<p>Dampak sanksi dalam pengiriman uang dapat dikategorikan dalam dua tipe yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Secara jangka pendek secara langsung berdampak pada terhambatnya aktivitas bank dalam transaksi internasional. Selain itu, terdapat pendapat dari ahli dan analis keuangan bahwa entitas Rusia membuat kesepakatan dengan <i>cryptocurrency</i>. Namun, terdapat keterbatasan volume dan likuiditas dalam <i>cryptocurrency</i> yang</p>

			<p>tidak dapat mengikuti kebutuhan ekonomi Rusia. Terlebih dengan <i>blockchain</i> memungkinkan pergerakan keuangan dari satu akun ke akun lainnya mudah terdeteksi dan termasuk kedalam aset yang sangat berisiko. Secara jangka panjang, sanksi tersebut dapat berdampak pada imigran dan pengiriman uang</p>
7.	<p>Tanvir Hasib dan Vijayakumar Vengadasalam</p> <p>“Impact of SWIFT Sanction on Global Economy”</p>	<p>Jenis Penelitian: <i>Kualitatif</i></p> <p>Pendekatan: <i>Ekonomi Global dan Sanksi SWIFT</i></p>	<p>SWIFT telah berpeluang dan siap untuk menghadapi digitalisasi serta memungkinkan penggunaannya untuk membuka peluang di segmen pasar baru. Dengan pembiayaan dengan nilai rendah dan mengurangi biaya transaksi menciptakan peluang SWIFT di sektor UKM dan konsumen. Larangan akses Rusia terhadap SWIFT memungkinkan</p>

		<p>percepatan sistem tersebut untuk memasuki era baru dalam aliran keuangan global. Selain itu, kemampuan SWIFT dalam menjatuhkan sanksi keuangan dengan konsekuensi yang serius akan menjadi terbatas.</p>
--	--	---

1.5 Landasan Teori

1.5.1 Teori Neo-Merkantilisme

Neo-merkantilisme pada dasarnya memiliki gagasan yang tidak jauh berbeda dengan teori merkantilisme mengenai penekanan terhadap kebijakan proteksionis yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Merkantilisme berpendapat bahwa kekuatan ekonomi dan kekuatan politik pada dasarnya bersifat saling melengkapi, bukan saling bersaing sehingga ekonomi menjadi sektor penting dalam persaingan kekuasaan.³² Sebelum tahun 1939, definisi terkait Neo-merkantilisme juga memiliki inti gagasan yang sama dengan merkantilisme yaitu tentang mempromosikan kekayaan negara dan kekuasaan sehingga keduanya saling berhubungan secara kompleks karena dengan memperkuat kekuasaan suatu negara akan meningkatkan kekayaannya begitu juga sebaliknya. Selain itu, Neo-merkantilisme juga mengangkat pentingnya industrialisasi sebagai instrumen yang

³² Robert Jackson dan Georg Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional: Teori dan Pendekatan Edisi Kelima*, ed. oleh Kamdani dan Rianayati Kusmini P, 5 ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).

krusial dalam mempercepat baik kekuatan politik maupun militer serta kekayaan suatu negara. Namun, Neo-merkantilisme dan merkantilisme merupakan perspektif yang berbeda karena Neo-merkantilisme muncul dan merespons lingkungan pengetahuan baru.³³ Kebijakan proteksionis yang agresif dengan tingginya hambatan tarif dan aksi boikot ekspor negara lain juga berperan besar dalam eskalasi ketegangan antar negara dunia. Hingga pada perang dunia I dan perang dunia II sehingga pasca tahun 1945, pemerintah negara dunia mulai memprioritaskan untuk meningkatkan kekuatan negara dan perusahaan nasional tanpa menggunakan kekerasan.³⁴ Penambahan kata “Neo” sendiri menekankan arti keberlanjutan dari teori merkantilisme dan mengganti beberapa gagasan dalam teori yang sebelumnya.³⁵

Neo-Merkantilisme merupakan salah satu perspektif *International Political Economy* (IPE) yang berfokus pada aspek ekonomi yang berbanding dengan realitas yang berfokus pada *politic-security*. Namun, keduanya sama-sama memandang sistem anarki menjadi arena dimana tidak ada sekutu dan koalisi yang permanen serta memandang negara sebagai aktor utama dalam hubungan internasional. Melalui Neo-merkantilisme, negara dipandang mampu merumuskan kebijakan ekonomi untuk meningkatkan kekayaan dan posisi mereka termasuk kondisi keamanan nasionalnya dalam sistem internasional.³⁶ Selain itu, David N. Balaam

³³ Eric Helleiner, *The Neomercantilists: a Global Intellectual History* (New York: Cornell University Press, 2021) <<https://doi.org/10.7591/cornell/9781501760129.001.0001>>.

³⁴ David N. Balaam dan Bradford Dillman, *Introduction to International Political Economy, Seventh Edition*, 7th ed. (New York: Routledge, 2019) <www.routledge.com/9781138206991>.

³⁵ Björn Hettne, “Neo-Mercantilism: What’s in a Word?,” *Occasional Paper*, 6 (2014), 205–30.

³⁶ Theodore Cohn dan Anil Hira, *Global Political Economy, Global Political Economy Theory and Practice*, 8 ed. (New York: Routledge, 2021) <<https://doi.org/10.4324/9781315664071>>.

dan Michael Veseth tahun 2005 dalam bukunya yang berjudul “*Introduction to International Political Economy, 3rd edition*” mendefinisikan Neo-merkantilisme sebagai versi merkantilisme yang berkembang pasca perang dunia kedua dan pada dasarnya merupakan kebijakan merkantilis yang diberlakukan dengan sistem perdagangan internasional yang liberal.³⁷ David N. Balaam dan Bradford D. tahun 2019 juga turut menjelaskan bahwa Neo-merkantilisme sendiri tidak hanya berfokus pada tujuan untuk mencapai surplus perdagangan, namun juga turut mempromosikan berbagai kebijakan perdagangan, finansial, dan pembangunan yang bersifat proteksionis untuk memperoleh kekayaan nasional dan meningkatkan keamanan nasional.³⁸

Gagasan terkait perspektif Neo-merkantilisme pada dasarnya cenderung berakar pada gagasan Friedrich List, pemikir Jerman dalam tulisannya *Das Nationale System der Politischen Ökonomie* atau Sistem ekonomi politik nasional tahun 1841 sebagai tanggapan atas kritik Smith akan merkantilisme Eropa pada abad ke-17 dan ke-18. Gagasan list dalam bukunya sangat dikenal lebih maju dalam kebijakan perdagangan proteksionis dibandingkan dengan gagasan kaum merkantilis. List menjabarkan bahwa industrialisasi nasional dapat didorong melalui hambatan perdagangan yang ditargetkan, mendukung produsen lokal, dan menarik investasi asing serta tenaga kerja ahli. Namun, para pemikir lainnya kemudian memberikan penekanan yang lebih pada jenis aktivitas ekonomi pemerintah yang lebih luas seperti pengelolaan pinjaman luar negeri, pengendalian

³⁷ David N. Balaam dan Michael Veseth, *Introduction to International Political Economy*, 3 ed. (Pearson Education, 2005).

³⁸ Balaam dan Dillman, *Introduction to International Political Economy, Seventh Edition*.

investasi asing dan impor tenaga kerja ahli, kebijakan nilai tukar, kerja sama multilateral, dan promosi ekspor di pasar internasional. Selain itu, beberapa pemikir Neo-merkantilisme juga menambahkan aktivitas ekonomi pemerintah yang luas di tingkat domestik seperti pendirian badan usaha milik negara termasuk bank, kebijakan sosial, kebijakan terhadap kepemilikan tanah, dan perencanaan perekonomian nasional. Kemudian, pada tahun 1970-an dan 1980-an, perspektif Neo-merkantilisme mulai banyak dikenali para ahli ketika menurunnya kekuatan Amerika Serikat dan pertumbuhan Jepang yang pesat pasca tahun 1945.³⁹

Pada tahun 1970, para ahli menggunakan istilah Neo-merkantilisme dalam memberikan gambaran terkait kebijakan ekonomi defensif yang digunakan negara-negara untuk melindungi masyarakat mereka dalam dinamika ekonomi politik internasional yang saling bergantung dan sangat kompetitif. Beberapa faktor penyebab naiknya perspektif Neo-merkantilisme diantaranya yaitu Neo-merkantilisme digunakan sebagai alat untuk melindungi negara dan kelompok bisnis dari berbagai ancaman ekonomi, adanya sifat saling ketergantungan antar negara dunia, pentingnya perjanjian finansial dan perdagangan internasional, dan meningkatnya investasi serta persebaran globalisasi teknologi yang pesat. Hal tersebut dapat ditunjukkan melalui struktur internasional pasca tentara Amerika Serikat mundur dari Vietnam pada tahun 1973 dimana pemerintahan Nixon berusaha mengkonfigurasi ulang struktur keamanan internasional bipolar yang cenderung Timur-Barat menjadi sistem keseimbangan kekuatan pentagonal

³⁹ Helleiner, *The Neomercantilists: a Global Intellectual History*.

multipolar.⁴⁰ Amerika Serikat kemudian memandang Republik Rakyat Tiongkok (RRT) sebagai salah satu dari lima kekuatan pentagonal dalam struktur keamanan internasional dimana kekuatan ekonomi menduduki posisi sama pentingnya dengan kekuatan militer.

Susunan baru dalam struktur keamanan internasional mendorong adanya kesempatan-kesempatan investasi baru bagi kelompok perusahaan multinasional antar blok negara-negara barat dan timur. Hal tersebut menjadi titik akan perubahan dalam struktur kekuasaan negara yang dulunya bipolar berubah menjadi multipolar. Kemudian, meningkatnya saling ketergantungan antara pasar-pasar nasional dimana mayoritas negara industri mulai menggunakan strategi pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh pasar.⁴¹ Kebijakan Neo-merkantilisme juga banyak digunakan pasca perang dunia kedua dan terutama ketika komunisme menurun pada tahun 1989 dimana sistem internasional cenderung bersifat saling ketergantungan. Terbentuknya beberapa organisasi internasional seperti *the General Agreement of Tariffs and Trade (GATT)*, *the World Trade Organization (WTO)*, dan *the Asian-Pacific Economic Conference (APEC)* juga mendorong adanya perdagangan yang bebas dan pasar terbuka sehingga mencegah adanya konflik merkantil yang agresif.⁴² Kemudian kontradiksi antara “logika negara” yang menangkap dan mengendalikan proses pertumbuhan ekonomi dan akumulasi modal serta “logika ekonomi” yang menempatkan kegiatan ekonomi di tempat yang

⁴⁰ David N. Balaam dan Bradford Dillman, *Introduction to International Political Economy, Sixth Edition*, 6 ed. (Pearson Education, Inc., 2014) <<https://doi.org/10.4324/9781315463452>>.

⁴¹ Balaam dan Dillman, *Introduction to International Political Economy, Seventh Edition*.

⁴² Balaam dan Veseth.

paling produktif dan menguntungkan⁴³ menyebabkan munculnya ekonomi politik internasional. Hal tersebut berarti logika merkantilisme dalam konteks kontemporer bukan lagi negara-bangsa melainkan ekonomi politik internasional dimana politik cenderung mengarah pada kerangka ekonomi transnasional. Oleh karena itu, beberapa unsur merkantilisme diperlukan untuk memberikan batasan-batasan politik dalam kebebasan ekonomi yaitu melalui kebijakan Neo-merkantilisme.⁴⁴

Kebijakan Neo-merkantilisme kemudian bertujuan sebagai strategi suatu negara untuk mengurangi kerentanan terhadap kompetisi internasional tanpa mengurangi komitmennya terhadap perdagangan bebas dibawah GATT (WTO) saat ini). Untuk meningkatkan surplus perdagangan melalui ekspor, beberapa negara menerapkan adanya hambatan non-tarif seperti standar kesehatan dan keamanan yang kompleks, persyaratan lisensi dan label, dan membatasi impor komoditas dan barang manufaktur tertentu. Selain itu, beberapa negara juga memberlakukan adanya kuota impor untuk mengontrol arus barang tertentu yang dapat diimpor.⁴⁵

Teori Neo-merkantilisme digunakan oleh penulis untuk menganalisis rumusan masalah penelitian terkait pengaruh keputusan Rusia dari *the Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications* (SWIFT). Dalam konteks ini, agar dapat melakukan operasionalisasi teori yang sesuai dengan fokus penelitian yaitu kemandirian ekonomi Rusia, penulis menggunakan dua kebijakan yang dikemukakan oleh David N. Balaam dan Bradford Dillman dalam *Introduction to*

⁴³ Robert Gilpin, *The Political Economy of International Relations* (United Kingdom: Princeton University Press, 1987).

⁴⁴ Hettne.

⁴⁵ Balaam dan Dillman, *Introduction to International Political Economy, Seventh Edition*.

International Political Economy, Sixth Edition. Dalam buku tersebut, Balaam dan Dillman berargumentasi bahwa terdapat dua bentuk kebijakan Neo-merkantilisme yang umum berdasarkan Balaam dan Dillman yaitu kebijakan industrial dan infrastrukural serta kebijakan sumber daya strategis. Kebijakan industrial dan infrastruktur sendiri bertujuan untuk memberikan keuntungan lebih kepada perusahaan-perusahaan dalam negeri dan mencegah pihak asing memperoleh banyak kendali atas suatu sektor ekonomi seperti sumber daya alam, pembangkit listrik, perbankan, dan media. Sedangkan kebijakan sumber daya strategis didasarkan pada kepercayaan kaum Neo-merkantilisme akan “ketergantungan” pada dasarnya tidak rata antar negara. Oleh karena itu, mayoritas negara secara konsisten berupaya untuk meminimalisir adanya ketergantungan terhadap negara lain dan berupaya menciptakan kondisi dimana negara lain akan bergantung pada mereka.⁴⁶

1.5.2 Nasionalisme Ekonomi

Nasionalisme ekonomi merupakan bentuk lebih luas dari proteksionisme yang terdiri dari serangkaian kebijakan negara tertentu seperti tarif dan lainnya. Nasionalisme ekonomi perlu dipahami sebagai upaya untuk menciptakan, memperkuat, dan melindungi perekonomian nasional dalam konteks pasar dunia.⁴⁷ Pada dasarnya “Nasionalisme Ekonomi” merupakan suatu perspektif yang

⁴⁶ Balaam dan Dillman, *Introduction to International Political Economy, Sixth Edition*.

⁴⁷ Sam Pryke, “Economic Nationalism: Theory, History and Prospects,” *Global Policy*, 3.3 (2012), 281–91 <<https://doi.org/10.1111/j.1758-5899.2011.00146.x>>.

melibatkan peran penting negara-bangsa dalam ekonomi.⁴⁸ Robert Gilpin dan Jean Gilpin sendiri mendefinisikan nasionalisme ekonomi sebagai upaya untuk mengembangkan sektor-sektor strategis dan upaya untuk mencapai kemandirian ekonomi serta seringkali disebut sebagai pendekatan *state-centric* yang terdiri dari elemen analitik dan normatif. Inti dari analitik menyadari kondisi alami hubungan internasional yang anarki, keutamaan negara dan kepentingan nasionalnya, dan pentingnya kekuasaan dalam hubungan antar negara. Kemudian, nasionalisme juga menjadi komitmen normatif terhadap negara-bangsa, pembangunan negara, dan keunggulan moral negara sendiri atas negara lain.⁴⁹ Namun, Eric Helleiner menyatakan bahwa Gilpin dan kebanyakan ekonom lainnya seringkali menggambarkan nasionalisme ekonomi yang berakar pada doktrin merkantilisme klasik dengan menggunakan perspektif lensa kekuasaan negara dan kompetisi geopolitik sehingga hilangnya “nasionalisme” dalam definisi nasionalisme ekonomi sebelumnya.⁵⁰

Beberapa konsep nasionalisme ekonomi dapat dikatakan hampir mirip dengan merkantilisme, namun nasionalisme ekonomi merupakan konsep yang lebih kontemporer karena menekankan peran negara dalam membimbing pembangunan ekonomi dan mempromosikan kepentingan ekonomi nasional sedangkan merkantilisme banyak berfokus pada akumulasi kekayaan melalui perdagangan dan

⁴⁸ Takeshi Nakano, “Hegel’s theory of economic nationalism: Political economy in the Philosophy of Right,” *European Journal of the History of Economic Thought*, 11.1 (2004), 33–52 <<https://doi.org/10.1080/0967256032000171498>>.

⁴⁹ Robert Gilpin dan Jean M. Gilpin, *Global Political Economy UNDERSTANDING THE INTERNATIONAL ECONOMIC ORDER* (United Kingdom: Princeton University Press, 2001).

⁵⁰ Eric Helleiner, “Economic Nationalism as a Challenge to Economic Liberalism? Lessons from the 19th Century,” *International Studies Quarterly*, 46 (2002), 307–29.

proteksionisme. Selain itu, aspek nasionalisme ekonomi lainnya mencakup kebijakan di luar proteksionisme seperti kebijakan industri, intervensi negara, kebijakan perdagangan strategis⁵¹, penetapan mata uang, dan arah investasi.⁵² Oleh karena itu, ekonomi nasionalisme juga dapat mengambil konsep dari kebijakan ekonomi liberal karena tidak hanya mencakup proteksionisme dimana negara memiliki peran besar dalam mengelola atau mengarahkan kekuatan ekonomi.⁵³ Meskipun tidak secara langsung dan spesifik, Hegel dalam karyanya *Elements of the Philosophy of Right* menjelaskan terdapat beberapa prinsip-prinsip utama dalam nasionalisme yaitu peran negara dalam nasionalisme ekonomi dapat berupa pembuatan kebijakan dan regulasi ekonomi atau tingkat kepemilikan negara atas industri dan/atau sektor ekonomi dalam negeri. Selain itu, tingkat intervensi suatu negara juga penting dalam mempromosikan tujuan ekonomi nasionalnya.⁵⁴

Nasionalisme Ekonomi seringkali digunakan oleh Pemerintahan Uni Eropa untuk mencegah perusahaan mengubah lingkungan ekonomi akibat meningkatnya kompetisi luar dalam perusahaan sehingga diperlukannya perlindungan pasar domestik. Abdelal tahun 2005 menjelaskan bahwa nasionalisme ekonomi tidak sejajar dengan statism karena terdapat aspek sosial di dalamnya. Hal tersebut karena nasionalisme ekonomi tidak hanya berfokus pada nasionalisme negara melalui ekonomi karena juga menitikberatkan nasionalisme aspek bangsa termasuk identitas nasional. Kemudian, nasionalisme ekonomi dalam bidang finansial

⁵¹ David Levi-Faur, "Economic nationalism: From Friedrich list to Robert Reich," *Review of International Studies*, 23.3 (1997), 359–70 <<https://doi.org/10.1017/S0260210597003598>>.

⁵² Pryke, *Op Cit*.

⁵³ Helleiner, "Economic Nationalism as a Challenge to Economic Liberalism? Lessons from the 19th Century."

⁵⁴ Nakano.

bertujuan untuk melindungi industri perbankan dengan dengan memberikan bank domestik keunggulan kompetitif dan mengurangi ancaman dari luar negeri yang akan mempengaruhi sistem perbankan dalam negeri.⁵⁵

Dalam level internasional, Benjamin Choen membedakan nasionalisme ekonomi dalam dua bentuk yaitu '*malign*' atau jahat dan '*benign*' atau jinak. *Malign* mengacu pada pendekatan nasionalis yang mencari tujuan nasional tanpa henti apapun caranya dan mengutamakan kepentingan nasional tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap stabilitas sistem internasional.⁵⁶ *Malign* dapat disetarakan dengan konsep proteksionisme klasik karena kesamaan karakteristik dalam proteksionisme tinggi dan intervensi negara.⁵⁷ Sedangkan, *Benign* merupakan pendekatan nasionalis yang terbuka untuk bekerja sama demi prioritas kebijakan nasional dan mengakui bahwa konflik kepentingan antar negara tidak dapat dihindari serta mencari solusi kooperatif.⁵⁸ *Benign* dan Nasionalisme ekonomi liberal berbeda dalam satu aspek dimana nasionalisme liberal melakukan liberalisasi aturan sedangkan *benign* memperkuat aturan. Kemudian, keduanya sama dalam hal kepentingan sistemik.⁵⁹ Perbedaannya adalah antara nasionalisme *malign* dan *benign* tersebut pada kemauan suatu negara untuk mengidentifikasi kepentingan nasionalnya sendiri dengan stabilitas internasional secara keseluruhan.

⁵⁵ Ben Clift dan Cornelia Woll, "Economic patriotism: reinventing control over open markets," *Journal of European Public Policy*, 19.3 (2012), 307–23 <<https://doi.org/10.1080/13501763.2011.638117>>.

⁵⁶ Levi-Faur, Op Cit.

⁵⁷ K van der Sleen, "Economic nationalism in the banking industry of Germany," 2013 <<http://essay.utwente.nl/62943/>>.

⁵⁸ Levi-Faur, Op Cit

⁵⁹ Sleen, Op Cit.

Nasionalisme *benign* mengakui hubungan antara kepentingan pribadi dan sistemik, sedangkan nasionalisme '*malign*' menyangkalnya.⁶⁰

Melalui konsep Nasionalisme ekonomi ini nantinya akan dapat digunakan sebagai pedoman dalam menganalisis peran Rusia bersama Bank Rusia dalam mengupayakan untuk mengurangi kerentanan ekonomi nasionalnya terhadap pihak eksternal dan mulai membentuk kemandirian ekonominya melalui mekanisme kebijakan dalam teori Neo-merkantilisme. Dari teori Neo-merkantilisme, diperoleh kesimpulan bahwa Rusia melakukan tindakan defensif untuk melindungi ekonomi nasionalnya dari dinamika ekonomi politik internasional dengan tidak hanya berfokus pada pencapaian surplus perdagangan, namun juga mempromosikan kebijakan yang mendukung untuk mencapai surplus perdagangan. Sedangkan, konsep nasionalisme ekonomi, menjelaskan Rusia sebagai negara berperan besar dalam melindungi perekonomian nasional dalam konteks pasar dunia untuk mencapai kemandirian ekonominya.

1.5.3 Konsep Sanksi Ekonomi

Sanksi ekonomi merupakan salah satu instrumen kebijakan luar negeri yang memperoleh perhatian banyak pemerintah negara dunia karena peningkatan dalam penggunaannya dan besarnya biaya ekonomi maupun sosial yang dibebankan kepada negara penerima sanksi, aktor non-negara, dan pihak ketiga. Sanksi ekonomi tersebut dapat berupa embargo perdagangan, pengendalian ekspor, dan

⁶⁰ Levi-Faur, *Op Cit*

pembatasan finansial, investasi, dan bantuan negara.⁶¹ Oleh karena itu, hingga kini sanksi ekonomi menjadi garis depan diplomasi internasional dan memperoleh popularitas pasca berakhirnya perang dingin.⁶² Sebelumnya sejak Perang dunia pertama, berbagai bentuk sanksi apapun dinilai efektif namun juga berpotensi besar mengarah pada perang sehingga sanksi ekonomi dinilai memberikan alternatif selain kekerasan dalam melawan agresi suatu negara dan dinilai mampu memberikan tekanan damai terhadap negara-negara lain.⁶³ Rosyidin dan Fitrah (2016) juga mendefinisikan sanksi ekonomi sebagai bentuk diplomasi koersif atau sebagai langkah alternatif dari perang.⁶⁴

Penerapan sanksi ekonomi pada dasarnya memiliki dua cara untuk diterapkan yaitu melalui tindakan terkait perdagangan dan tindakan terkait finansial. Tindakan terkait perdagangan secara luas dapat diterapkan melalui tindakan sanksi perdagangan seperti larangan akan impor dan ekspor sedangkan tindakan terkait finansial secara kontras berkaitan dengan pasar mata uang, arus keuangan, dan pola asuransi.⁶⁵ Salah satu tujuan dari kebijakan sanksi ekonomi adalah untuk mengubah kebijakan atau keputusan strategi suatu negara atau non-negara yang mengancam kepentingan nasional negara pengirim serta untuk mengecam suatu negara atau

⁶¹ Kern Alexander, *Economic Sanctions: Law and Public Policy* (New York: Palgrave Macmillan, 2009) <<https://doi.org/10.1057/9780230227286>>.

⁶² Nikolay Anguelov, *Economic Sanctions vs Soft Power: Lessons from North Korea, Myanmar, and the Middle East, Andrew's Disease of the Skin Clinical Dermatology*. (New York: Palgrave Macmillan, 2015).

⁶³ Robert D. Blackwill dan Jennifer M. Harris, *War by Other Means* (London: Harvard University press, 2016) <<https://doi.org/10.4159/9780674545960>>.

⁶⁴ Achmad Ismail, "Sanksi Ekonomi Dalam Tinjauan Politik Dan Diplomasi Internasional: Resensi Buku", *Indonesian Perspective*, Vol.5 No.1, Januari-Juni 2020, hlm. 112

⁶⁵ Richard Nephew, *The Art of Sanctions: a View from the Field* (New York: Columbia University Press, 2018).

aktor non-negara yang melanggar norma internasional. Sanksi ekonomi juga bertujuan untuk kontraterorisme, kontranarkotika, non-proliferasi, demokrasi dan promosi Hak Asasi Manusia, resolusi konflik, dan keamanan siber. Beberapa tahun terakhir, sanksi ekonomi menjadi ciri khas negara-negara Barat terutama Amerika Serikat untuk menanggapi beberapa tantangan geopolitik dan menjadi salah satu kebijakan luar negeri yang penting.⁶⁶

Dalam perkembangannya, sanksi ekonomi kemudian menargetkan skala sasaran yang lebih sempit konsep *smart sanction* atau *targeted sanction* muncul sebagai alternatif guna meminimalisir penderitaan warga sipil yang tidak bersalah karena ditujukan kepada elit politik atau militer negara sasaran. *Smart Sanction* sendiri dapat berupa pembekuan aset di luar negeri, *travel ban*, embargo militer, pengurangan bantuan asing, pembatasan modal, pembatasan perdagangan.⁶⁷

Sanksi ekonomi juga turut menghadirkan perdebatan akan efektivitasnya, beberapa faktor pendukung sanksi ekonomi mencapai efektivitasnya antara lain yaitu:⁶⁸

- 1) Negara penerima sanksi harus menanggung lebih besar biaya dari yang ditanggung oleh negara pengirim sanksi,
- 2) Dukungan dari aktor-aktor lain agar sanksi ekonomi terimplementasi secara efektif mencapai tujuannya yaitu menekan negara penerima sanksi,

⁶⁶ Arnold.

⁶⁷ William H. Kaempfer dan Anton D. Lowenberg, "The Political Economy of Economic Sanctions," *Handbook of Defense Economics*, 2.06 (2007), 867–911 <[https://doi.org/10.1016/S1574-0013\(06\)02027-8](https://doi.org/10.1016/S1574-0013(06)02027-8)>.

⁶⁸ Achmad Ismail, "Sanksi Ekonomi...", hlm. 115

- 3) Sanksi akan berhasil ketika negara pengirim sanksi mempertimbangkan tingkat ketergantungan terhadap negara penerima sanksi,
- 4) Menjangkau berbagai sektor dan berbagai aktor untuk dampak yang menyeluruh,
- 5) Mempertimbangkan karakter rezim politik negara penerima sanksi, biasanya dijatuhkan kepada negara sekutu dan demokratis sehingga

Penerapan sanksi ekonomi juga turut memunculkan adanya pertanyaan terkait efektivitasnya sebagai instrumen politik luar negeri dimana para ekonom menganggap bahwa sanksi dianggap efektif apabila negara penerima mengalami kerusakan ekonomi yang signifikan atau “dampak ekonomi”. Namun, para ahli politik menyebutkan bahwa sanksi dianggap efektif apabila negara pengirim sanksi memperoleh tujuan politik yang mereka inginkan atau “keberhasilan politik”. Namun, pada dasarnya keduanya memiliki keterkaitan satu sama lain untuk menjelaskan efektivitas sanksi ekonomi dimana sanksi ekonomi ditujukan untuk membebani sejumlah biaya ekonomi terhadap negara penerima sanksi agar mengubah keputusan atau tindakan politik yang dianggap melanggar norma internasional.⁶⁹ Johan Galtung berpendapat bahwa teori umum terkait sanksi ekonomi menjelaskan bahwa sanksi akan menyebabkan kesulitan ekonomi yang mengarah pada ketidakstabilan politik hingga pada akhirnya negara penerima sanksi patuh terhadap tuntutan negara pengirim sanksi.⁷⁰ Kemudian, terdapat empat

⁶⁹ T Clifton Morgan, Constantinos Syropoulos, dan Yoto V Yotov, “Economic Sanctions: Evolution, Consequences, and Challenges,” *Journal of Economic Perspectives*, 37.1 (2023), 3–30.

⁷⁰ Anguelov.

kesimpulan umum terkait bagaimana sanksi ekonomi dinilai berpengaruh signifikan terhadap negara penerima sanksi diantaranya yaitu:⁷¹

- 1) Dampak sanksi terhadap berbagai pelaku ekonomi baik perusahaan maupun individu, sektor, dan aktivitas spesifik cenderung negatif
- 2) Sanksi ekonomi berdampak sangat negatif terhadap keseluruhan kinerja negara penerima sanksi yang meliputi perdagangan, *Foreign Direct Investment* (FDI), pertumbuhan, angka kemiskinan, dan stabilitas politik
- 3) Sanksi berdampak pada pembangunan ekonomi, arus perdagangan, *Foreign Direct Investment* (FDI), dan pertumbuhan bersifat jangka panjang dimana dampak tersebut tetap ada bahkan ketika sanksi telah dicabut
- 4) Dampak sanksi ekonomi juga dapat beragam berdasarkan bentuk sanksi yang diberikan seperti sanksi perdagangan atau sanksi keuangan baik secara keseluruhan maupun parsial. Selain itu, dampak juga dilihat dari penerapan sanksi tersebut secara unilateral atau multilateral

Saat ini, penerapan sanksi ekonomi dengan volume besar banyak diberlakukan oleh Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya secara terkoordinasi.⁷² Kemudian, negara-negara penerima sanksi umumnya berupaya untuk meminimalisir dampak sanksi dengan mengubah orientasi perdagangan internasional dan arus investasi mereka ke negara dunia ketiga dengan tujuan untuk melindungi perusahaan-perusahaan krusial bagi kepentingan nasional. Selain itu, negara penerima sanksi juga membentuk aliansi dengan negara-negara dunia ketiga

⁷¹ Morgan, Syropoulos, dan Yotov.

⁷² Eric L. Hirschhorn, Brian J. Egan, dan Edward J. Krauland, *U.S. Export Controls and Economic Sanctions*, 4 ed. (New York: Oxford University Press, 2022).

yang “ramah” dan juga menjatuhkan sanksi balasan terhadap negara pemberi sanksi.⁷³ Dalam konteks ini, konsep sanksi ekonomi digunakan sebagai landasan bagi penulis untuk menjelaskan keseluruhan fenomena sanksi terutama sanksi ekonomi yang telah diterima oleh Rusia terutama sanksi yang berasal dari sistem pesan keuangan global yaitu SWIFT.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian eksplanatif yang bertujuan untuk menguji hubungan antar variabel atau unit analisa dan unit eksplanasi yang dihipotesiskan.⁷⁴ Tipe penelitian eksplanatif bersifat menguji teori dan kemudian memperoleh gambaran terkait hubungan sebab akibat dimana metode ini digunakan untuk menjawab pertanyaan “bagaimana” dan menjelaskan secara komprehensif terkait pengaruh keputusan Rusia dari *the Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication* (SWIFT) terhadap kemandirian ekonomi Rusia dengan menggunakan teori Neo-merkantilisme, konsep Nasionalisme Ekonomi, dan konsep sanksi ekonomi.

1.6.2 Level Analisa

Penelitian ini menggunakan “kemandirian ekonomi Rusia” sebagai unit analisis dengan “keputusan Rusia dari *the Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication* (SWIFT)” sebagai unit eksplanasi. Oleh karena itu,

⁷³ Morgan, Syropoulos, dan Yotov.

⁷⁴ Mohammad Mulyadi, “Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya [Quantitative and Qualitative Research and Basic Rationale to Combine Them],” *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 15.1 (2019), 128–38.

penelitian ini menggunakan model level analisis induksionis dimana tingkat unit eksplanasi yaitu sistem regional atau global lebih tinggi dari tingkat unit analisa yaitu negara-bangsa.

1.6.3 Metode Analisa Data

Penelitian ini menggunakan metode analisa data kualitatif, yaitu untuk meneliti keadaan obyek yang alami dan menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci dalam menganalisis. Metode kualitatif yang digunakan bertujuan untuk menguji suatu teori.⁷⁵ Penelitian ini menggunakan literatur dan informasi-informasi yang berasal dari jurnal, buku, *working paper*, laporan tahunan, press release, serta platform resmi milik SWIFT yang mendukung untuk dijadikan data dan konsep dalam menjelaskan pengaruh keputusan Rusia dari SWIFT terhadap kemandirian ekonomi Rusia.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dimana data dikumpulkan melalui pencarian di sumber literatur, catatan-catatan, buku, dan laporan yang berkaitan dengan isu terkait.⁷⁶ Data-data tersebut diperoleh melalui analisis pada jurnal, skripsi, kertas kerja, buku, website resmi SWIFT dan negara pemberi sanksi, dan peraturan Uni Eropa yang memberikan pemahaman komprehensif terkait konflik Rusia-Ukraina, Sanksi Ekonomi, Sanksi Finansial, dan sanksi SWIFT. Selain itu, untuk memperoleh data terkait profil SWIFT beserta

⁷⁵ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17.33 (2019), 81 <<https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>>.

⁷⁶ *Ibid*

sanksi-sanksi SWIFT, data diperoleh melalui peraturan Uni Eropa, jumpa pers SWIFT dan Uni Eropa, dan laporan tahunan SWIFT serta beberapa jurnal dan buku yang terkait sebagai data tambahan.

Penjabaran akan keseluruhan data terkait kemandirian ekonomi Rusia utamanya dalam sektor finansial diperoleh melalui analisis secara studi pustaka yang berasal dari jumpa pers pemerintah Rusia dan Bank Rusia, jumpa pers Presiden Vladimir Putin, laporan tahunan Bank Rusia dari tahun 2014 hingga tahun 2022, jumpa pers dari Asosiasi perbankan dan komunikasi keuangan Rusia, laporan tahunan VTB Bank dan Sberbank, website resmi bank-bank besar Rusia, artikel media Rusia. Selain itu, untuk memperkuat analisis penulis terkait kemandirian ekonomi Rusia kemudian turut menggunakan sumber jurnal, buku, dan kertas kerja diluar dari data-data berasal dari Rusia.

1.6.5 Ruang Lingkup Penelitian

1.6.4.1 Batasan materi

Jangkauan pembahasan dalam penelitian ini meliputi dinamika ketegangan antara Rusia dengan Barat atas invasi Ukraina dan bagaimana kemandirian ekonomi Rusia menghadapi sanksi SWIFT melalui sistem pembayaran dan pesan keuangan nasional.

1.6.4.2 Batasan Waktu

Peneliti membatasi rentang waktu penelitian pada tahun 2014 hingga 2023 untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian melalui sumber data yang akurat dan terkait langsung dengan penelitian ini. Pemilihan rentang waktu tersebut

disebabkan pada tahun 2014, Rusia membentuk SPFS sebagai respon dari adanya ancaman pembatasan akses ke SWIFT atas tindakan Rusia menginvasi Ukraina dan menganeksasi wilayah Semenanjung Krimea. Pada Februari 2022, Rusia kembali melakukan invasi ke wilayah Ukraina dan menyebabkan Rusia resmi dikeluarkan dari layanan pesan keuangan SWIFT. Kemudian, tahun 2023 ditujukan untuk melihat volume perdagangan Rusia yang berimplikasi pada pembayaran perdagangan Rusia akibat sanksi SWIFT.

1.7 Hipotesa

Sanksi ekonomi menargetkan finansial yang dijatuhkan oleh negara-negara Barat terhadap Rusia secara eksplisit mempengaruhi kondisi perekonomian Rusia karena secara signifikan berdampak pada perdagangan, pengiriman uang secara *cross-border*, dan cadangan devisa Rusia. Selain itu, sanksi tersebut tidak hanya berdampak pada tingkat negara, namun kelompok-kelompok kepentingan dan individu turut terdampak atas sanksi dikeluarkannya Rusia dari SWIFT.

Sanksi yang telah berlangsung lama dan terus diperpanjang kemudian menciptakan adanya resistensi dalam menyelamatkan perekonomian nasionalnya. Selain itu, sanksi tersebut mempengaruhi kepentingan ekonomi nasional Rusia yang pada akhirnya akan berdampak signifikan pada perekonomian Rusia. Terciptanya kemandirian ekonomi Rusia pasca dikeluarkan dari sistem keuangan global yaitu jaringan telekomunikasi *the Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications* (SWIFT) dapat ditunjukkan melalui teori neo-merkantilisme yang antara lain dapat dijalankan melalui beberapa kebijakan yaitu kebijakan

industrial dan infrastruktural serta kebijakan sumber daya strategis. Oleh karena itu, Rusia sebagai negara memiliki peran besar dalam mengambil keputusan untuk mencapai kemandirian ekonomi nasionalnya. Selain itu, terdapat konsep Nasionalisme Ekonomi untuk menjelaskan pengaruh keputusan Rusia dari SWIFT dimana Rusia berupaya untuk menciptakan, memperkuat, dan melindungi perekonomian nasional serta mengembangkan sektor-sektor strategis dan upaya untuk mencapai kemandirian ekonominya melalui pembentukan *Russia's System for Transfer of Financial Messages* (SPFS). SPFS Rusia bertujuan untuk mengurangi ancaman dari luar negeri yang akan mempengaruhi sistem perbankan dalam negeri dan melindungi industri perbankan dalam negeri. Dalam pembentukan kemandirian ekonomi Rusia yang utamanya dalam lingkup sistem pembayaran, dan penggunaan alternatif jaringan negara lainnya seperti CIPS dan SEPAM untuk meningkatkan hubungan ekonomi antara Rusia dan pemilik alternatif SWIFT tersebut.

1.8 Sistematika Penulisan

Tabel 1.2 Sistematika Penulisan

<p>BAB I Pendahuluan</p>	<p>1.1 Latar Belakang 1.2 Rumusan Masalah 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.3.1 Tujuan Penelitian 1.3.2 Manfaat Penelitian 1.3.2.1 Manfaat Akademis 1.3.2.2 Manfaat Praktis 1.4 Penelitian Terdahulu 1.4.1 Sanksi Finansial Melalui SWIFT 1.4.2 Dampak dan Strategi Rusia dalam Menghadapi Sanksi Finansial 1.5 Landasan Teori 1.5.1 Teori Neo-Merkantilisme 1.5.2 Konsep Nasionalisme Ekonomi 1.5.3 Konsep Sanksi Ekonomi 1.6 Metode Penelitian 1.6.1 Tipe Penelitian 1.6.2 Level Analisa 1.6.3 Metode Analisa Data 1.6.4 Teknik Pengumpulan Data 1.6.5 Ruang Lingkup Penelitian 1.6.5.1 Batasan Materi 1.6.5.2 Batasan Waktu 1.7 Hipotesa 1.8 Sistematika Penulisan</p>
<p>BAB II Dinamika Sanksi terhadap Rusia atas Invasi Ukraina Melalui Sistem Finansial Global</p>	<p>2.1 Eskalasi Konflik dan Sanksi-Sanksi terhadap Rusia atas Invasi Ukraina 2.2 SWIFT sebagai Instrumen Sanksi Finansial 2.2.1 Profil SWIFT 2.2.2 Sanksi-Sanksi SWIFT 2.2.3 Sanksi SWIFT terhadap Rusia</p>
<p>BAB III Kemandirian Ekonomi Rusia Menghadapi Sanksi Finansial SWIFT</p>	<p>3.1 Dinamika Terputusnya Akses Rusia terhadap SWIFT 3.2 Kebijakan Infrastruktur Finansial Rusia sebagai Alternatif SWIFT Melalui Kemandirian Ekonomi Rusia 3.2.1 Pembentukan <i>Russia's System for Transfer of Financial Messages (SPFS)</i></p>

	<p>3.2.2 Pembentukan Sistem Pembayaran Nasional Melalui Kartu Mir</p> <p>3.2.3 Perumusan Mata Uang Rubel Digital</p> <p>3.3 Kebijakan Sumber Daya Strategis Rusia Terkait Pembayaran Perdagangan Internasional dan Orientasi Kerja Sama</p> <p>3.4 Analisis Kemandirian Ekonomi Rusia dalam Perspektif Nasionalisme Ekonomi</p>
<p>BAB IV Penutup</p>	<p>4.1 Kesimpulan</p> <p>4.2 Saran</p>

